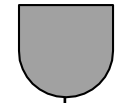
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH BANTEN	Nomor SOPAP	:	W.12.KP.08.02-02
	Tanggal Pembuatan	:	03 Januari 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	03 Januari 2024
	Disahkan Oleh	:	Kepala Kantor Wilayah
			 DODOT ADIKOESWANTONIP 196603291990031001
	Nama SOPAP	:	Penelaahan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945	1. Mengerti dan Memahami Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	2. Mengerti dan Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dari Perspektif HAM
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik	3. Pendidikan S1
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Hukum Daerah	
7. Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015-2019	
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Pengiriman surat koordinasi	1. Komputer/Printer/Scanner
2. SOP Pengajuan Pelaksanaan Kegiatan	2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. SOP Penyelenggaraan Rapat	3. Jaringan Internet
4. SOP Penyampaian Rekomendasi	4. Buku-buku terkait HAM dan Peraturan Perundang-Undangan
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi pelanggaran HAM	Arsip data, *hard disk/drive*, *hardcopy*

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KAKANWIL	KADIV YANKUMHAM	KABID HAM	PEMPROV	PEMDA KAB/KOTA	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Memerintahkan Kadiv yankum untuk melaksanakan telaahan produk hukum daerah						DIPA dan TOR	10 menit	Disposisi	
2.	Meneruskan disposisi Kakanwil tentang pelaksanaan telaahan produk hukum daerah						DIPA dan TOR	10 menit	Disposisi	
3.	Mengajukan surat koordinasi dengan Pemprov terkait pelaksanaan telaahan produk hukum daerah						Disposisi surat	1 hari	Konsep surat koordinasi	
4.	Menyetujui surat koordinasi pelaksana an telaahan produk hukum daerah		T				Konsep surat koordinasi	1 hari	Konsep surat koordinasi	
5.	Menyetujui surat koordinasi pelaksana an telaahan produk hukum daerah	T	Y				Konsep Surat Koordinasi	1 hari	Surat Koordinasi	
6.	Meneruskan surat pelaksanaan telaahan produk hukum daerah ke Pemda Kab/Kota	Y					Surat Koordinasi	1 hari	Disposisi dan surat koordinasi	
7.	Menerima surat ko-ordinasi dan mem-berikan rekapitulasi produk-produk hukum Daerah kepada Ka. Kanwil Kemenkum-ham						Disposisi dan surat koordinasi	1 hari	Rekapitulasi produk hukum	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KAKANWIL	KADIV YANKUMHAM	KABID HAM	PEMPROV	PEMDA KAB/KOTA	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
										
6.	Menerima dan meneruskan rekapi tulasi produk hukum daerah kepada Kadiv Yankumham						Surat koordinasi Rekapitulasi produk hukum	1 hari	Disposisi	
5.	Memerintahkan pelaksanaan rapat penelaahan produk-produk hukum Daerah						Rekapitulasi produk hukum	1 hari	Inventaris produk hukum	
6.	Melaksanakan rapat penelaahan produk-produk hukum Daerah						Inventaris produk hukum	60 hari	Produk hukum yang bernuansa HAM	
7.	Menyampaikan rekomendasi terkait produk hukum daerah yang belum berperspektif HAM						Rekapitulasi produk hukum	1 hari	Produk hukum yang belum bernuansa HAM	